

SKRIPSI

**PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN DESENTRALISASI FISKAL
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH PADA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH (OPD) KABUPATEN SIAK**

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau*



Oleh :

**SRI NAHDA
165310738**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan

Telp. (0761) 674674 Fax. (0761) 674834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SRI NAHDA
NPM : 165310738
FAKULTAS : EKONOMI
JURUSAN : AKUNTANSI SI
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGUNG
JAWABAN DAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KINERJA
PEMERINTAH PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
KABUPATEN SIAK

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING

Dr. Azwirman, SE., M., Acc., Ak., CA

Mengetahui :

DEKAN

KETUA PRODI AKUNTANSI


Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA


Siska, SE., M.Si., Ak., CA



UNIVERSITAS ISLAM RIAU




FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 674681
Fax. (0761) 674834 PEKANBARU – 28284

NOTULENSI SEMINAR HASIL

- 1 Nama Mahasiswa : Sri Nahda
- 2 NPM : 165310738
- 3 Hari/ Tanggal : Selasa 18 Agustus 2020
- 4 Judul Penelitian : Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggung Jawaban dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Pemerintah Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Siak.

Sidang dibuka oleh Dr. Azwirman, SE.,M.Acc.,Ak.,CA dan mempersilahkan mahasiswa untuk mempresentasikan hasil penelitiannya, selama sepuluh menit dan selanjutnya diadakan sesi tanya jawab.

No	Saran Tim Penguji	Pemeriksaan	Keterangan	Tanda Tangan
1	Dr. Kasman Arifin ZA, SE.,MM : <ul style="list-style-type: none">o Abstrak : cocokkan dengan judulo Bab 1 : fenomena, apa hubungan antara penerapan akuntansi dengan responsibility akuntansi. Rumusan masalah hal 7. No 3 tidak diminta oleh inspektorat.o Bab 2 : perjas apa itu akuntansi pertanggungjawaban dan desentralisasi fiskal Apa yang dimaksud desentralisasi fiskal dalam pemerintahan.	<ul style="list-style-type: none">o Sudah diperbaikio Sudah di perbaiki o Sudah diperbaiki	<p>Terlihat pada halaman i dan ii</p> <p>Terlihat pada halaman 6</p> <p>Terlihat pada halaman 12</p>	 
2	Dian Saputra, SE.,M.Acc.,Akt,CA <ul style="list-style-type: none">o Judul : pada judul huruf di bold dan sesuai dengan buku panduan skripsi	<ul style="list-style-type: none">o Sudah diperbaiki	Terlihat pada cover	

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Abstrak : abstrak bahasa indonesia dan bahasa inggris dipisah halaman ○ Daftar pustaka : untuk daftar pustaka menggunakan website harus mencantumkan kapan web tersebut diakses. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sudah diperbaiki ○ Sudah diperbaiki 	<p>Terlihat pada halaman i dan ii</p> <p>Terlihat pada daftar pustaka</p>	
--	---	--	---	--

Mengetahui,

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Dr.Hj.Siska,SE.,M.Si.,AK.,CA
Ketua Jurusan Akuntansi SI

Disetujui

[Handwritten signature]

Dr. Azwirman, SE.,M.Acc.,Ak.,CA
Pembimbing





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan. Pekanbaru.Riau. Indonesia - 28284
Telp +62 761 674674 Fax +62 761 674834 Email : fekon@uir.ac.id Web : www.uir.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

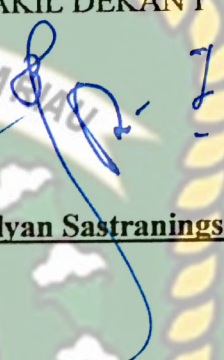
NAMA : SRI NAHDA
NPM : 165310738
FAKULTAS : EKONOMI
JURUSAN : AKUNTANSI S1
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNG
JAWABAN DAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KINERJA
PEMERINTAH PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
KABUPATEN SIAK
SPONSOR : Dr. Azwirman, SE.,M.Acc.,Ak.,CA
Dengan Rincian Sebagai Berikut:

Tanggal	Catatan		Berita Acara	Paraf	
	Sponsor	Co Sponsor		Sponsor	Co Sponsor
2/12/2019	X		- Latar Belakang Masalah		
6/12/2019	X		- Operasional Variabel - Latar Belakang Masalah		
11/12/2019	X		- Teknis Penulisan		
19/12/2019	X		- ACC Proposal		
08/05/2020	X		- Populasi dan Sampel - Susunan Uji Hipotesis harus sesuai dengan urutan - Perbaikan Kesimpulan		
12/05/2020	X		- Perbaikan Populasi dan Sampel		

			- Perbaikan Hasil Kesimpulan		
15/05/2020	X		- ACC Seminar Hasil		

Pekanbaru, 1 September 2020

WAKIL DEKAN I


Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau No: 885/KPTS/FE-UIR/2020, Tanggal 18 Agustus 2020, Maka pada Hari Selasa 18 Agustus 2020 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau pada Program Studi Akuntansi S1 Tahun Akademis 2020/2021

1. Nama : Sri Nahda
2. NPM : 165310738
3. Program Studi : Akuntansi S1
4. Judul skripsi : Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggung Jawaban dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Pemerintah Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Siak.
5. Tanggal ujian : 18 Agustus 2020
6. Waktu ujian : 60 menit.
7. Tempat ujian : Ruang sidang meja hijau Fekon UIR
8. Lulus Yudicium/Nilai : **Lulus (B+) 71,25**
9. Keterangan lain : Aman dan lancar.

PANITIA UJIAN

Ketua


Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si
Wakil Dekan Bidang Akademis

Sekretaris


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
Ketua Prodi Akuntansi S1

Dosen penguji :

1. Dr. Azwirman, SE., M.Acc., CPA
2. Dr. Kasman Arifin, SE., MM., Ak., CA
3. Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak., CA., ACPA

Notulen

1. Masnur, SE., M.Si

Pekanbaru, 18 Agustus 2020
Mengetahui
Dekan,


Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 885 / Kpts/FE-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau dilaksanakan ujian skripsi /oral comprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangunan
b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN


Menetapkan : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

N a m a : Sri Nahda
N P M : 165310738
Program Studi : Akuntansi S1
Judul skripsi : Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggung Jawaban dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Pemerintah Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Siak.

2. Penguji ujian skripsi/oral comprehensive mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	Dr. Azwirman, SE., M.Acc., CPA	Lektor, C/c	Materi	Ketua
2	Dr. Kasman Arifin, MM	Lektor Kepala	Sistematika	Sekretaris
3	Dian Saputra, SE.,M.Acc.,Ak.CA	Assisten Ahli, C/b	Methodologi	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6	Masnur, SE.,ME	Asisten Ahli, C/a	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.
Kutipan: Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 18 Agustus 2020
Dekan,

Dr. Firdaus AR, SE., M.Si, Ak., CA

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

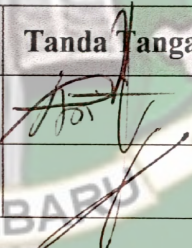
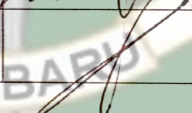
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Sri Nahda
NPM : 165310738
Jurusan : Akuntansi / S1
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggung Jawaban dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Pemerintah Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Siak.
Hari/Tanggal : Selasa 18 Agustus 2020
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Azwirman, SE., M.Acc., CPA		

Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Kasman Arifin, SE., MM., Ak., CA		
2	Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak., CA., ACPA		

Hasil Seminar : *)

1. Lulus (Total Nilai)
2. Lulus dengan perbaikan (Total Nilai **70,5**)
3. Tidak Lulus (Total Nilai)

Mengetahui
An.Dekan


Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si
Wakil Dekan I

Pekanbaru, 18 Agustus 2020
Ketua Prodi


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

*) Coret yang tidak perlu

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647


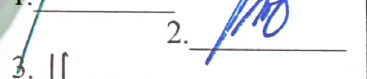

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Sri Nanda
NPM : 165310738
Judul Proposal : Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggung Jawaban dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Siak
Pembimbing : 1. Dr. Azwirman, SE., M.Acc, CPA
Hari/Tanggal Seminar : Selasa / 18 Februari 2020

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

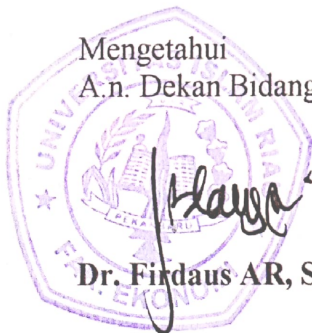
1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Dr. Azwirman, SE., M.Acc, CPA		1. 
2.	H. Burhanuddin, SE., M.Si		2. 
3.	Haugesti Diana, SE., M.Ak		3. 

*Coret yang tidak perlu

Mengetahui
A.n. Dekan Bidang Akademis,



Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA

Pekanbaru, 18 Februari 2020
Sekretaris,

Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 3073/Kpts/FE-UIR/2019
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1
Bismillahirrohmanirrohim
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Surat penetapan Ketua Jurusan / Program Studi Akuntansi tanggal 27 November 2019 tentang penunjukan Dosen Pembimbing skripsi mahasiswa.
 2. Bahwa dalam membantu mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik perlu ditunjuk Dosen Pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003
 2. Undang-Undang RI Nomor: 14 Tahun 2005
 3. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 4 Tahun 2014
 5. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
 a. Nomor : 192/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Eko. Pembangunan
 b. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Manajemen
 c. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Akuntansi S1
 d. Nomor : 001/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/I/2014 Tentang Akreditasi D.3 Akuntansi
 6. Surat Keputusan YLPI Daerah Riau
 a. Nomor: 66/Skep/YLPI/II/1987
 b. Nomor: 10/Skep/YLPI/IV/1987
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 8. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Riau tanggal 10 Maret 1987
 a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

MEMUTUSKAN

Menetapkan: 1. Mengangkat Saudara-saudara yang tersebut namanya di bawah ini sebagai Pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu:

No	N a m a	Jabatan/Golongan	Keterangan
1	Dr. Azwirman, SE., M.Acc., CPA	Lektor, C/c	Pembimbing

② Mahasiswa yang dibimbing adalah:
 N a m a : Sri Nahda
 N P M : 165310738
 Jurusan/Jenjang Pendd. : Akuntansi / S1
 Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Siak.

3. Tugas pembimbing adalah berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor: 52/UIR/Kpts/1989 tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Riau.

4. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya memperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal

5. Kepada pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.

6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini segera akan ditinjau kembali.

Kutipan: Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan menurut semestinya.

Ditetapkan di: Pekanbaru
 Pada Tanggal: 27 November 2019
 Dekan,

Drs. H. Abrar, M.Si, Ak, CA

Tembusan : Disampaikan pada:

1. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau

2. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email: fekon@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : SRI NAHDA
NPM : 165310738
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN DESENTRALISASI FISKAL
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH PADA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH (OPD) KABUPATEN SIAK

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi Kurang dari 30 % yaitu 28 % pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*, Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 1 September 2020
Ketua Program Studi Akuntansi

K

Siska, SE., M.Si., Ak., CA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN
DAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KINERJA PEMERINTAH
PADA ORGANISASI PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(OPD) KABUPATEN SIAK**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain. Yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Pekanbaru, 1 September 2020

Yang memberi pernyataan,



SRI NAHDA
165310738

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari penerapan akuntansi pertanggungjawaban dan desentralisasi fiskal terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan pada 27 kantor Organisasi Perangkat Daerah yang berbentuk dinas dan badan pada kota Siak Sri Indrapura.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini dengan cara menyebarkan kuesioner. Populasi pada organisasi tersebut berjumlah 54 dan diambil menggunakan metode purposive sampling, diambil 27 kantor untuk dijadikan sampel dan pada setiap sampel diambil 3 orang sebagai responden sehingga total responden menjadi 78 orang. Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi linier berganda. Untuk menguji kualitas data digunakan uji validitas dan reabilitas, selanjutnya uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikorelasionalitas, uji heteroskedastisitas dan juga menggunakan uji hipotesis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban dan desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah

Kata kunci : penerapan akuntansi pertanggungjawaban; desentralisasi fiskal; kinerja pemerintah

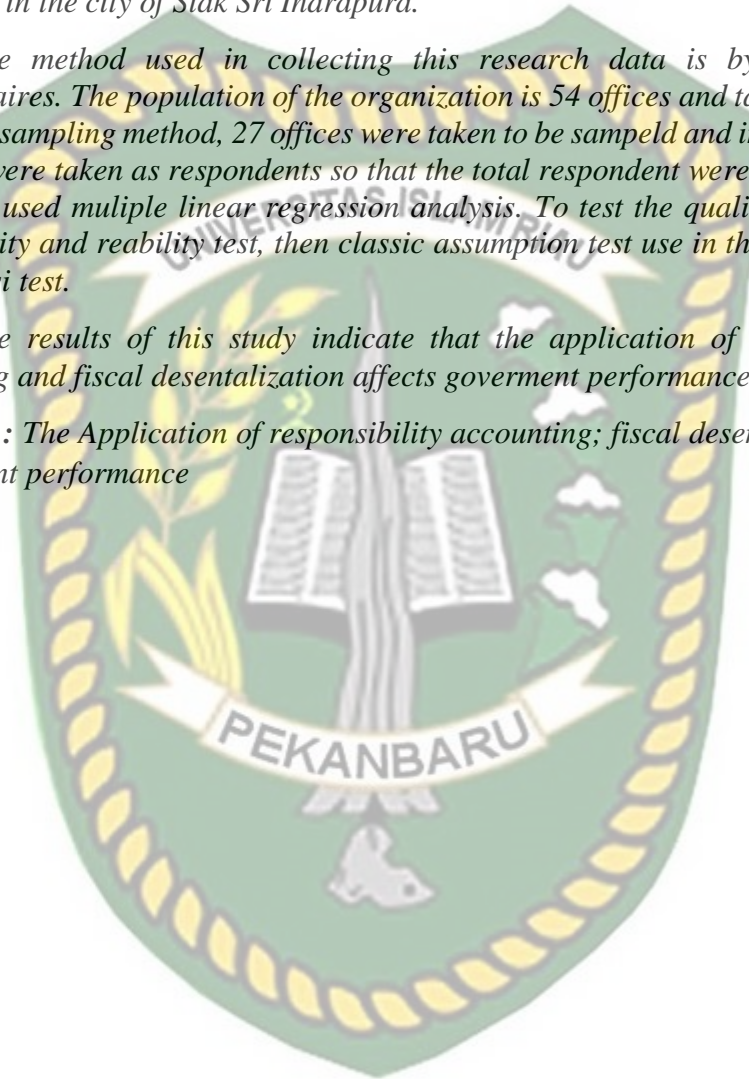
ABSTRACT

This study aims to examine the effect of the application of responsibility accounting and fiscal decentralization on government performance. This research was conducted at 27 regional office organizations in the form of agencies and institution in the city of Siak Sri Indrapura.

The method used in collecting this research data is by distributing questionnaires. The population of the organization is 54 offices and taken using the purposive sampling method, 27 offices were taken to be sampeld and in each sample 3 people were taken as respondents so that the total respondent were 78 people. In this study used multiple linear regression analysis. To test the quality of the data used validity and reability test, then classic assumption test use in this study is the hypothesisi test.

The results of this study indicate that the application of responsibility accounting and fiscal desentalization affects government performance.

Keywords : *The Application of responsibility accounting; fiscal desentalization; government performance*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga skripsi dengan judul **“PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNG JAWABAN DAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KINERJA PEMERINTAH PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIAK”**, guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Penulis percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan izin dan ketapan dari Allah SWT, namun penyusunan skripsi ini tidak lepas dari orang-orang disekitar penulis yang begitu banyak memberikan bantuan serta dukungan. Maka pada kesempatan ini izinkan penulis untuk ucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Firdaus AR, SE., M. Si.,Ak.,CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
3. Ibu Siska, SE. Msi.,Ak.,CA sebagai ketua Jurusan Proqram Studi Ekonomi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
4. Bapak Azwirman, SE.,M.Acc.CPA selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan sabar dalam membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi.

5. Bapak Hariswanto, SE., M.Si. Ak., CA selaku dosen Pembimbing Akademik yang juga telah membantu penulis dalam berkonsultasi selama perkuliahan.
6. Bapak/ Ibu Dosen yang telah memberikan pengetahuannya kepada penulis selama proses perkuliahan. Semoga semua ilmu yang diberikan selalu dalam keberkahan Allah SWT, sehingga dapat berguna dikemudian hari. Seluruh pimpinan, staf tata usaha, staf perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada Kedua Orang Tua atas Segala curahan kasih sayang, perhatian, dukungan dan pengarahan serta do'a yang selalu dipanjatkan kepada-Nya.
8. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaa. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kesempurnaan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna menyempurnakan pengetahuan penulis.

Pekanbaru, 24 Juni 2020

Penulis,

SRI NAHDA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Sistematika Penulisan	9
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	
2.1. Tinjauan Teoritis	11
2.1.1. Akuntansi pertanggung jawaban	11
2.1.2. Pusat pertanggung jawaban	12
2.1.3. Syarat-syarat akuntansi pertanggung jawaban	13
2.1.4. Sistem penilaian dari pusat pertanggungjawaban.....	15
2.1.5. Desentralisasi fiskal	17
2.1.6. Syarat desentralisasi fiskal	19
2.1.7. Manfaat desentralisasi fiskal	20

2.1.8. Kinerja.....	21
2.1.9. Kinerja pemerintah	21
2.2. Penelitian Terdahulu	23
2.3. Kerangka Pemikiran	26
2.4. Hipotesis	26
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Objek dan Lokasi Penelitian.....	27
3.2. Populasi dan Sampel	27
3.3. Jenis dan Sumber Data	29
3.4. Operasional Variabel	30
3.5. Teknik Pengumpulan data	31
3.6. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	38
4.1.1. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah.....	38
4.1.2. Gambaran Umum Kabupaten Siak	38
4.1.2.1. Letak dan konsisi geografis	38
4.1.2.2. Luas dan batas wilayah administrasi	39
4.1.2.3. demografi.....	39
4.1.3. Visi dan Misi Kabupaten Siak	40

4.1.4. .Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kota Siak Sri Indrapura Kabupaten Siak	41
4.2. Hasil Penelitian	43
4.2.1. Data Penelitian	43
4.2.2. Deskripsi Responden	44
4.2.3. Teknik Analisis Data	46
4.2.3.1. Statistik Deskriptif	46
4.2.3.2. Uji Kualitas Data	47
4.2.3.2.1. Uji Validitas	47
4.2.3.2.2. Uji Reliabilitas	49
4.2.3.3. Uji Asumsi Klasik.....	49
4.2.3.3.1. Uji Normalitas	49
4.2.3.3.2. Uji Multikorelasionalitas.....	51
4.2.3.3.3. Uji Heterokedatisitas	52
4.2.3.4. Analisis Regresi Linier Berganda	54
4.2.3.5. Pengujian Hipotesis	55
4.2.3.5.1. Uji Simultan (Uji T)	55
4.2.3.5.2. Uji Parsial (Uji F)	56
4.2.3.6. Koefisien Determinasi	57
4.3. pembahasan	57

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	61
5.2. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	62
BIODATA PENULIS	62



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	23
Table 3.1 Daftar sampel yang menjadi objek penelitian.....	28
Tabel 4.1 Susunan Organisasi Kabupaten Siak	41
Tabel 4.2 Tingkat Pengembalian Kuesioner	44
Tabel 4.3 Demografi Responden	45
Tabel 4.4 Descriptif Statistic	47
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas	48
Tabel 4.6 Hasil Uji Reabilitas	50
Tabel 4.7 One Sample Kolmogorov-Smirnov.....	51
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinieritas	52
Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas	54
Tabel 4.10 Regresi Linier Berganda.....	55
Tabel 4.11: Hasil Uji F	56
Tabel 4.12 Hasil Uji T	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka penelitian	25
Gambar 4.1 Grafik Histogram	50
Gambar 4.2 Normal Probability Plot	51
Gambar 4.3 Scatterplot	53



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Bukti Penelitian

Lampiran 2 : Distribusi Jawaban Responden

Lampiran 3 : Hasil Output SPSS

Lampiran 4 : Kuesioner Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dengan perubahan sistem sektor publik di negara ini menuntut rezim politik yang demokratis, karena adanya tuntutan tersebut menyebabkan terjadinya responsibilitas dan keterbukaan yang menjadi hal yang terpenting dalam penyelenggaraan pemerintah terutama dibidang keuangan negara. Terlebih lagi setelah pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, hal itu menggerakkan adanya desentralisasi atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut maka pemerintah daerah diberi beban tanggungjawab untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam berbagai organisasi, perusahaan ataupun instansi pemerintah tentunya memerlukan kegiatan operasional yang efektif dan juga efisien sesuai perencanaan yang dilakukan. Berbagai macam kebijakan diberlakukan agar pegawai atau karyawan mentaati dan loyal terhadap instansi, mereka dapat memilih jalan yang baik dalam melakukan perannya untuk mencapai tujuan bersama. aktivitas yang dilakukan harus didokumentasi mengenai jumlah atau data yang digunakan dalam kegiatan operasionalnya. Suatu perencanaan kerja harus disampaikan dengan jelas kepada pihak-pihak yang terlibat agar pihak yang menjalankan suatu perencanaan tersebut memahami dengan baik kemana arah dan tujuan dari suatu perencanaan yang telah di

buat. Tentunya penyampaian itu dilakukan oleh atasan kepada bawahannya, untuk melakukan hal tersebut maka dibuatlah struktur organisasi yang jelas yang berguna dalam menempatkan tugas tiap pihak yang terkait sesuai dengan bidang dan kompetensinya

Kinerja dapat didefinisikan sebagai kesanggupan seseorang atau kelompok untuk melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggungjawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan menurut Rivai dalam penelitian (Sandy : 2015). Sedangkan menurut Mangkunegara (2010) kinerja didefinisikan sebagai hasil kerja yang kualitasnya dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, seperti ketepatan penyusunan anggaran, akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran, komitmen organisasi, pengendalian *intern*, gaya kepemimpinan, dan desentralisasi. Mungkin banyak variabel lainnya yang juga mampu mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dalam penelitian-penelitian terdahulu. Akan tetapi, dalam penelitian ini peneliti mencoba fokus penelitian pada Desentralisasi didalamnya terdapat bagian yang salah satunya desentralisasi fiskal dan penerapan akuntansi pertanggungjawaban.

Menurut Yuliasuti (2016) Akuntansi pertanggungjawaban adalah prosedur yang terbentuk karena struktur organisasi yang terdiri dari beberapa pusat pertanggungjawaban yang tujuannya untuk mengukur kinerja pada organisasi dan juga berfungsi sebagai pemisah tugas dan tanggungjawab yang

jasas. Kepala bidang dapat mengukur kinerja dengan cara melaporkan semua aktivitas kepada masing-masing pusat pertanggungjawaban.

Dengan adanya akuntansi pertanggungjawaban, masing-masing kepala bidang yang bertanggungjawab dapat dikendalikan kinerjanya serta dapat dievaluasi melalui laporan hasil pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban juga dapat mengendalikannya kinerja dari tiap bidang atau pusat tersebut.

Menurut Badrudin (2012) Desentralisasi fiskal merupakan alat untuk mencapai tujuan bernegara, tujuan utamanya untuk memberikan layanan publik yang lebih demokratis dengan melimpahkan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat.

Dengan adanya pemahaman yang baik dan penerapan desentralisasi fiskal dapat meningkatkan kualitas kinerja dari pemerintah dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat dengan menggunakan anggaran dari pusat untuk mendukung fungsi pemerintah dan pelayanan publik sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan. Seperti yang kita tau bahwa sejauh ini pelayanan publik masih kurang maksimal.

Pada penelitian Yuliasuti (2016) dengan judul pengaruh partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja manajerial (studi pada dinas pendapatan dan pengelolaan aset daerah provinsi Jawa Tengah). Yang menyimpulkan bahwa partisipasi anggaran secara signifikan

tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial dan akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja.

Sedangkan pada penelitian Novita (2018) dengan judul penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban sebagai penilaian kinerja pada PT. Perkebunan Nusantara V, menyimpulkan bahwa sistem akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan dalam suatu perusahaan tersebut belum menunjukkan perannya sebagai alat penilaian kinerja.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Manurung (2012) dengan judul pengaruh desentralisasi fiskal, akuntabilitas dan sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja pada SKPD Kota Palangkaraya. Menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh desentralisasi fiskal, akuntabilitas dan sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Yuliasuti (2016) dan penelitian Manurung (2012), yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian. Pada penelitian Yuliasuti objek penelitian dilakukan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dan penelitian Manurung dilakukan pada SKPD Kota Palangkaraya, sedangkan penelitian ini dilakukan pada OPD Kabupaten Siak, yang mana seiring berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah telah terjadi perubahan istilah dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) menjadi OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel akuntansi pertanggungjawaban seperti pada penelitian Yuliasuti dan

variabel desentralisasi fiskal seperti pada penelitian Manurung. Alasan peneliti tidak mengambil variabel lainnya yang ada pada penelitian Yuliasuti dan Manurung, karena variabel tersebut telah banyak dilakukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang hasil dari penelitiannya sudah jelas.

Adapun fenomena yang terjadi dilingkungan pemerintah Kabupaten Siak yaitu kesulitan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal yang meliputi pemanfaatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang mana sumber-sumber pendanaan daerah kabupaten siak berasal dari PAD yang belum dimanfaatkan secara optimal khususnya pada pajak daerah. Jenis- jenis pajak yang di pungut oleh pemerintah kabupaten siak dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah saat ini terdiri atas sepuluh jenis pajak antara lain yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame pajak air dan tanah, pajak penerangan jalan, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan.

Namun ada beberapa diantaranya yang masih terdapat masalah yaitu pajak restoran, dikarenakan daya beli dan pengunjung yang kurang sehingga kesulitan bagi pihak pemerintah untuk menagih pajak pada pihak pemilik restoran, kemudian pada pajak sarang burung walet, yang menjadi kendalanya yaitu pemilik walet tidak bisa membayar pajak setiap bulan dikarenakan walet panen hanya 3 bulan sekali. Serta pada pajak hotel dan pajak hiburan yang menjadi permasalahan adalah kurangnya pengunjung yang berdampak pada tidak adanya pemasukan bagi pihak hotel dan pemilik tempat hiburan sehingga kesulitan bagi mereka untuk membayar pajak.

Penerapan akuntansi merupakan sebuah proses mengidentifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi terutama yang bersifat keuangan untuk memberikan informasi kuantitatif dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

Menurut Sugianto dkk(1995) dikutip oleh Abdul Halim dan Muhammad Syam Khusufi akuntansi terdiri dari 3 bidang utama yaitu : Akuntansi Komersil, Akuntansi Sektor Publik yang didalamnya terdapat akuntansi pemerintahan dan akuntansi sosial, dan Akuntansi nasional.

Pada saat terjadinya reformasi pada tahun 1998 yang mempengaruhi semua bidang kehidupan, yang menjadi sorotan utama dalam penyelenggaraan reformasi yaitu bidang pemerintahan. Perbaikan dalam bidang pemerintahan ini juga berdampak pada bidang pengelolaan keuangan negara, baik yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun beberapa poin utama dalam reformasi pengelolaan keuangan negara yaitu :

- 1 Anggaran tradisional menjadi anggaran kerja
- 2 Pengendalian audit keuangan dan kinerja
- 3 Menerapkan konsep value for money
- 4 Penerapan pusat pertanggungjawaban
- 5 Perubahan sistem akuntansi pemerintahan

Kemudian adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (PMPD) atas proyek sistem informasi administrasi dan keuangan anggaran APBD tahun 2015, kasus ini

terungkap pada tahun 2017. Proyek tersebut diadakan untuk 122 desa di seluruh Kabupaten Siak, untuk satu desa anggarannya disediakan Rp 17.325.000. Menurut hasil pemeriksaan BPKP Riau, hanya 80 desa saja yang ada pada aplikasi tersebut, dan sebagian aplikasi tersebut pun banyak rusak, dikarenakan kasus ini kerugian negara ditaksir mencapai Rp 1,1 miliar dalam proyek Sistem Informasi Manajemen Administrasi dan Keuangan Desa (SIMKUDES). Dari permasalahan ini dapat dilihat bahwa kinerja Kabupaten Siak belum dapat dikatakan baik karena masih terdapat kasus korupsi dikalangan pejabatnya serta para pegawainya yang melalaikan tugasnya (Chaidir Anwar Tanjung- DetikNews).

Berdasarkan uraian diatas, dapat kita lihat bahwa kinerja pemerintah Kota Siak belum dapat dikatakan baik sepenuhnya, serta dari uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang difokuskan pada sejauh mana pengaruh beberapa faktor yang diduga berpengaruh pada kinerja pemerintah. Faktor-faktor tersebut diantaranya desentralisasi dan akuntansi pertanggungjawaban, dalam hal ini peneliti mencoba untuk meneliti pada salah satu jenis dari desentralisasi yaitu desentralisasi fiskal. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul: **Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Siak.**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh penerapan akuntansi pertanggung jawaban terhadap kinerja pemerintah daerah ?
2. Bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kinerja pemerintah daerah ?
3. Bagaimana pengaruh simultan penerapan akuntansi pertanggung jawaban dan desentralisasi fiskal terhadap kinerja pemerintah daerah ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini untuk menemukan bukti hal-hal sebagai berikut :

1. Menguji dan mengetahui pengaruh dari penerapan akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja pemerintah daerah
2. Menguji dan mengetahui pengaruh dari desentralisasi fiskal terhadap kinerja pemerintah daerah.
3. Menguji dan mengetahui pengaruh secara simultan dari penerapan akuntansi pertanggung jawaban dan desentralisasi fiskal terhadap kinerja pemerintah daerah

1.4. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang lebih mendalam tentang pengaruh desentralisasi dan penerapan akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Siak.

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah khususnya pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan juga dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai pengaruh desentralisasi dan akuntansi pertanggung jawaban terhadap kinerja pemerintah daerah. Selain itu penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam menerapkan desentralisasi dan akuntansi pertanggung jawaban. Serta saran yang dapat dijadikan pedoman ataupun bahan pertimbangan.
3. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan bisa melakukan penelitian yang sama dengan penambahan variable, dan bisa dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahaminya maka penulis menjadikan beberapa bab, dari masing-masing bab dalam sistematika adalah sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Pada bab ini mengemukakan landasan teori atau telaah Pustaka mengenai Akuntansi Pertanggungjawaban, Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Pemerintah. Serta mengemukakan kerangka pemikiran penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan metode penelitian yang terdiri dari objek dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data dan analisis data penelitian.

BAB 4 : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang sejarah geografis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Siak, serta bagian dari dinas yang menjalankan aktivitas struktur organisasi dari dinas kabupaten siak dan deskripsi jabatan serta bidang dari dinas.

BAB 5 : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan tentang pengaruh penerapan akuntansi pertanggungjawaban dan desentralisasi fiskal terhadap kinerja pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

BAB 6 : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan kesimpulan dari penulis sebagai hasil dari penelitian dan saran untuk penelitian dimasa yang akan datang.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Teoritis

2.1.1. Definisi Akuntansi Pertanggungjawaban

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan pengelompokan anggota organisasi dalam perusahaan berdasarkan tanggungjawab masing-masing bagian. Masing-masing bagian tersebut harus mempertanggung jawabkan laporan yang mereka buat (Mulyadi, 2010). Akuntansi pertanggungjawaban berguna untuk menjelaskan dari sebuah akuntansi perencanaan, pengukuran, dan pengevaluasian kinerja dari suatu organisasi sesuai dengan garis pertanggung jawaban seperti pendapatan dan biaya diakumulasikan kemudian dilaporkan pada pusat pertanggungjawaban.

Definisi lain menurut Yuliasuti (2016) menyatakan, bahwa akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem yang terbentuk dari struktur organisasi yang terbagi dengan beberapa pos pertanggungjawaban, yang berguna sebagai pengukuran kinerja, pemisahan fungsi, tugas dan tanggungjawab yang jelas.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban merupakan alat untuk mengukur kinerja dari masing-masing pusat pertanggung jawaban, akuntansi pertanggungjawaban dapat diterapkan pada organisasi swasta atau pun pada organisasi sektor publik seperti pemerintahan, adapun pusat pertanggungjawaban pada pemerintahan

seperti pusat pendapatan adalah Dinas pendapatan, pusat biaya adalah bagian keuangan, pusat laba dan investasi seperti BUMD atau perusahaan daerah.

2.1.2. Pusat Pertanggungjawaban

Menurut Simamora (2012 :225) Pusat Akuntansi Pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh manajer, dan manajer tersebut bertanggungjawab atas kebragaman aktivitas tersebut.

Sedangkan menurut Krismiaji dan Aryani (2011 : 289) pusat pertanggungjawaban merupakan unit organisasi yang dibebankan dengan tanggungjawab khusus. Pusat pertanggungjawaban merupakan dasar dalam menerapkan akuntansi pertanggungjawaban. Maka dari itu manajer harus lebih berhati-hati dalam menentukan tugas dan wewenang sesuai dengan struktur yang telah disusun oleh perusahaan.

Pusat pertanggungjawaban terbagi menjadi empat menurut Hansen dan Mowen (2015 : 545) :

1. Pusat biaya

Menurut Garrison *et al.*, (2010 : 509) manajer pusat biaya memiliki kendali atas biaya, tetapi tidak pada pendapatan atau penggunaan dana investasi. Departemen layanan seperti *accounting*, *finance*, administrasi umum, hukum, dan personel biasanya diklasifikasikan sebagai pusat biaya.

2. Pusat laba

Menurut Garrison *et al.*, (2010 : 509-510), manajer pusat laba memiliki kendali atas biaya dan pendapatan, tetapi tidak atas penggunaan dana

investasi. Manajer pusat laba sering dievaluasi dengan membandingkan laba aktual dengan laba yang ditargetkan atau yang dianggarkan.

3. Pusat pendapatan

Menurut Bintariani (2015 :14), manajer pusat pendapatan hanya memiliki kendali terhadap biaya pemasaran langsung dan kinerja mereka akan diukur dalam hal kemampuan mereka untuk mencapai target penjualan yang ditentukan sebelumnya dalam batasan beban tertentu. Manajer pusat pendapatan dievaluasi kinerjanya dengan membandingkan penjualan actual dengan penjualan yang ditargetkan.

4. Pusat investasi

Menurut Garrison *et al.*, (2010 :510), manajer pusat investasi memiliki kendali atas biaya, pendapatan, dan investasi dalam asset operasi. Manajer pusat investasi sering dievaluasi dengan menggunakan *Return on Investment* (ROI) atau tindakan penghasilan residual.

2.1.3.Syarat Akuntansi Pertanggungjawaban

penerapan akuntansi pertanggungjawaban akan lebih efisien dan efektif digunakan pada perusahaan yang memiliki struktur organisasi yang baik dan job description yang jelas untuk masing-masing departemen. Untuk dapat diterapkannya akuntansi pertanggungjawaban yang memadai ada lima syarat yang harus dipenuhi menurut Mulyadi (2010) :

1) Struktur organisasi

Dalam akuntansi pertanggungjawaban struktur organisasi harus menggambarkan aliran tanggungjawab, wewenang, dan posisi yang

jelas untuk setiap unit kerja dari setiap tingkat manajemen selain itu juga harus dengan pembagian tugas yang jelas. Dengan begitu wewenang mengalir dari tingkat manajemen atas kebawah, sedangkan tanggungjawab adalah sebaliknya.

2) Anggaran

Dalam akuntansi pertanggungjawaban setiap pusat pertanggungjawaban harus ikut serta dalam penyusunan anggaran karena anggaran merupakan gambaran rencana kerja para manajer yang akan dilaksanakan dan sebagai dasar dalam penilaian kerjanya. Di ikut sertakan semua manajer dalam penyusunannya.

3) Pengelolaan biaya

Karena tidak semua biaya yang terjadi dalam suatu bagian dapat dikendalikan oleh manajer, maka hanya biaya-biaya terkendali yang harus dipertanggungjawabkan olehnya. Biaya terkendali yang dimaksud adalah biaya yang dapat secara langsung dipengaruhi oleh manajer dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan biaya tak terkendali adalah biaya yang tidak memerlukan keputusan dan pertimbangan manajer karena hal ini dapat mempengaruhi biaya karena biaya ini diabaikan.

4) Sistem akuntansi

Terdapatnya susunan kode rekening perusahaan yang dikaitkan dengan kewenangan pengendalian pusat pertanggungjawaban. Oleh karena itu biaya yang terjadi akan dikumpulkan untuk setiap tingkatan manajer

maka biaya akan digolongkan dan di berikode sesuai dengan tingkatan manajemen yang terdapat dalam struktur organisasi.

5) Sistem pelaporan biaya

Bagian akuntansi biaya setiap bulannya membuat laporan pertanggungjawaban untuk tiap-tiap pusat biaya. Setiap bulan dibuat rekapitulasi biaya atas dasar total biaya bulan lalu, yang tercantum dalam kartu biaya. Atas dasar rekapitulasi biaya disajikan laporan pertanggungjawaban biaya. Isi dari laporan pertanggungjawaban biaya disesuaikan dengan tingkatan manajemen yang menerimanya.

2.1.4. Sistem Penilaian dari Pusat Pertanggungjawaban

Menurut Yuliasuti (2016) dalam menilai pusat pertanggungjawaban, dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu :

1. Struktur organisasi

Menurut Lubis (2018 : 323-325) agar pusat pertanggungjawaban berfungsi dengan memadai, harusnya pusat pertanggungjawaban tersebut harus sama dengan struktur organisasi. Pendekatan yang digunakan dalam mendesain struktur organisasi dan dalam membebaskan tanggungjawab bervariasi dari suatu perusahaan ke perusahaan lainya tergantung pada pilihan manajemen puncak dan gaya kepemimpinan.

Struktur organisasi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :

1) Struktur vertikal

Dalam struktur vertikal organisasi dibagi berdasarkan fungsi utama. Tanggung jawab secara keseluruhan untuk fungsi produksi, penjualan, dan keuangan diberikan kepada wakil direktur, yang mendelegasikan tanggung jawab kepada struktur dibawahnya sesuai dengan hirarki. Namun, tanggungjawab akhir berada ditangan mereka.

2) Struktur horizontal

Dalam struktur horizontal pendelegasian tanggung jawab yang paling sesuai. Struktur tersebut dapat dibagi berdasarkan produk atau area geografis. Masing-masing mewakili direktur mengendalikan pusat laba atau investasi daripada pusat pendapatan dan pusat biaya fungsional. Mereka bertanggungjawab atas produksi, penjualan, dan pendanaan atau dengan kata lain,seluruh bidang fungsional dalam area.

Jenis struktur yang dipilih akan memengaruhi jaringan pusat pertanggungjawaban, yang pada gilirannya berfungsi sebagai kerangka bagi arus data dan kebutuhan pelaporan.

1. Anggaran

Menurut Simanjuntak (2018 : 7) anggaran adalah hasil kerja (*output*) terutama berupa taksiran-taksiran yang akan dilaksanakan masa mendatang. Karena anggaran merupakan hasil kerja (*output*), maka anggaran dituangkan dalam suatu naskah tulisan yang disusun secara teratur dan sistematis.

Menurut Halim dan khusufi (2016 : 48), anggaran adalah dokumen yang berisikan estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masalalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja.

Dari kedua definisi di atas dapat di simpulkan bahwa anggaran merupakan rencana yang telah di susun secara sistematis dan meliputi segala kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang. Anggaran juga merupakan salah satu syarat agar terlaksananya akuntansi pertanggungjawaban.

2. Sistem pelaporan akuntansi pertanggungjawaban

Sistem pelaporan dalam prinsip akuntansi pertanggungjawaban, manajer lini bertanggungjawab atas kelompoknya serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada pejabat yang lebih tinggi. Laporan pertanggungjawaban adalah laporan yang dibuat dengan hasil catatan akuntansi pertanggungjawaban yang dibuat oleh bagian akuntansi dan dikirim keseluruh tingkatan manajemen yang akan menerimanya (Prima, 2014).

2.1.5. Definisi Desentralisasi fiskal

Menurut Hansen dan Mowen (2011:559), desentralisasi merupakan praktek penyerahan wewenang dalam pengambilan keputusan kepada tingkatan yang lebih rendah.

Sedangkan menurut Zikrina (2017:15), desentralisasi adalah seberapa jauh manajemen level yang lebih tinggi memperbolehkan manajemen di level yang lebih rendah mengambil keputusan yang independen.

Konsep desentralisasi terdiri dari empat, yaitu :

1. Desentralisasi politik

Pelimpahan wewenang yang lebih besar kepada daerah yang menyangkut aspek pengambilan keputusan, termasuk penetapan standar berbagai peraturan

2. Desentralisasi administrasi

Merupakan pergeseran volume pekerjaan dari departemen pusat kepada perwakilannya yang ada di daerah tanpa adanya penyerahan atau pelimpahan kewenangan untuk mengambil keputusan atau keleluasaan untuk membuat keputusan.

3. Desentralisasi ekonomi

Adalah pengelolaan ekonomi (perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, dan evaluasi) yang sebelumnya lebih didominasi pemerintah pusat dialihkan kewenangannya kepada pemerintah daerah.

4. Desentralisasi fiskal

Suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi ke pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintah dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintah yang dilimpahkan.

Selanjutnya penulis akan menjabarkan lebih lanjut mengenai desentralisasi fiskal sesuai dengan variabel :

Menurut Noor (2016) desentralisasi fiskal diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintah, oleh pemerintah (pusat) kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara yang berkaitan dengan anggaran.

Sedangkan menurut Manurung (2012) desentralisasi fiskal adalah penyerahan wewenang kepada daerah untuk menggali sendiri sumber-sumber penerimaan daerah sesuai dengan potensinya masing-masing.

2.1.6. Syarat Desentralisasi Fiskal

Menurut Sidik (2010) menyebutkan bahwa syarat keberhasilan suatu desentralisasi bergantung pada desain, proses implementasi, dukungan politis, baik pada pengambilan keputusan dimasing-masing tingkat pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan, kesiapan administrasi pemerintahan, pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia, mekanisme koordinasi untuk meningkatkan kinerja aparat birokrasi, perubahan sistem nilai dan perilaku birokrasi dalam memenuhi keinginan masyarakat khususnya dalam pelayanan sektor publik. Disamping itu, pemerintah daerah harus didukung oleh sumber-sumber keuangan yang memadai, baik yang berasal dari *local revenue*, pinjaman, maupun transfer dari pemerintah pusat. Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan baik dengan berpedoman pada hal-hal berikut :

1. Pemerintah pusat *capable* dalam melakukan pengawasan dan *enforcement*.
2. Terdapat keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah.

2.1.7. Manfaat Desentralisasi Fiskal

Manfaat desentralisasi fiskal secara umum adalah :

1. Efisiensi ekonomi
 Anggaran daerah untuk pelayanan publik bisa lebih mudah disesuaikan dengan preferensi masyarakat setempat dengan tingkat akuntabilitas dan kemauan bayar yang tinggi.
2. Peluang meningkatkan penerimaan pajak dari pajak daerah.
 Pemerintah daerah bisa menarik pajak dengan basis konsumsi dan aset yang tidak bisa ditarik oleh pemerintah pusat.

Sedangkan manfaat penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia yaitu mampu menyukseskan tujuan-tujuan pembangunan lewat pemberian hak kontrol kepada masyarakat yang memiliki informasi dan insentif untuk membuat keputusan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, serta pemberian tanggungjawab dan kewenangan lebih kepada daerah dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi dari layanan publik.

Sedangkan kelemahan dari penerapan desentralisasi fiskal yaitu lemahnya kontrol pemerintah pusat terhadap ekonomi makro, sulitnya menerapkan kebijakan stabilitas ekonomi, sulitnya menerapkan kebijakan

pembangunan ekonomi dengan pemerataan, besarnya biaya yang harus ditanggung pemerintah daerah dari pada keuntungan yang didapat.

2.1.8. Kinerja

Pada dasarnya pengertian kinerja dapat dimaknai secara beragam. Kinerja sebagai hasil dari suatu proses penyelesaian pekerjaan maupun perilaku yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Agar terdapat kejelasan mengenai kinerja, akan disampaikan beberapa pengertian mengenai kinerja.

Menurut Mangkunegara (2013 :67) Istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *Actual Performance* yakni prestasi kerja atau kinerja sesungguhnya dari seorang pegawai/karyawan, maka pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan menurut Mulyadi (2015 : 63) mendefinisikan kinerja dan kuantitas yang sesuai dengan tugas dan tanggungjawab mereka.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja sebagai hasil kerja sebagai hasil kerja yang dicapai oleh individu yang disesuaikan dengan peran atau tugas individu tersebut dalam suatu organisasi yang dihubungkan dengan suatu ukuran nilai atau standar tertentu dari organisasi dimana individu bekerja.

2.1.9. Kinerja Pemerintah

Menurut Bastian dalam penelitian Manurung (2012) kinerja pemerintah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan suatu

organisasi dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan suatu organisasi.

Mengacu pada definisi dan pemahaman konsep kinerja sebagaimana dipaparkan diatas, maka tujuan atau perencanaan organisasi merupakan aspek utama dalam langkah-langkah mencapai kinerja organisasi. Kinerja yang pada umumnya menggambarkan prestasi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya sangat dipengaruhi oleh jenis dan karakteristik organisasi serta lingkungan dimana ia berada. Bagi organisasi pemerintah tentunya sedikit banorganisasi pemerintah tentunya sedikit banyak memiliki lingkungan khusus yang berbeda dengan organisasi privat. Sesuai dengan karakteristiknya, organisasi pemerintah merumuskan pernyataan visi dan misi untuk lebih mengutamakan kepentingan publik melalui pemberian pelayanan dan pelaksanaan program-program pembangunan disemua aspek kehidupan masyarakat dengan tanpa menciptakan tingkat kesenjangan sosia-ekonomi yang makin tinggi.

Sebagai konsekuensi logis dan pengutamaan visi dan misi tersebut, organisasi pemerintah dituntut untuk selalu mengadaptasikan dirinya ditengah-tengah lingkungan yang semakin dinamis, kompetitif dalam arus globalisasi. Tantangan tidak saja berasal dari luar organisasi tetapi juga dalam organisasi sendiri, seperti kualitas sumber daya aparat yang masih rendah, budaya kerja dan sistem nilai yang masih mendorong terjadinya KKN, serta keterbatasan anggaran, dan lain sebagainya. Adapun tantangan yang berasal dari luar organisasi pada umumnya lebih pesat berkembang dan tingkat

kompleksitasnya lebih tinggi, seperti tingginya tuntutan *customer* (dalam hal ini masyarakat pengguna jasa), perkembangan teknologi yang sangat pesat, serta masuknya sistem pasar bebas yang tidak dapat dihindari.

Seluruh tantangan dan perubahan lingkungan tersebut harus mampu direspon secara tepat oleh organisasi pemerintah disemua level (pusat, provinsi dan kabupaten/kota). Salah satu bentuk respon organisasi pemerintah adalah dengan merumuskan rencana strategis organisasi pemerintah pada masing-masing bagian atau unsur dalam kelembagaan pemerintah. Dari rencana strategis tersebut dapat diketahui apa yang menjadi prioritas tujuan pemerintah sehingga dapat dirumuskan strategis yang tepat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Menurut Mahmudi (2010 : 14) tujuan pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi
2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai.
3. Memperbaiki kinerja periode berikutnya.
4. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian reward dan punishment.
5. Memotivasi pegawai.
6. Menciptakan akuntabilitas publik.

2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu :

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

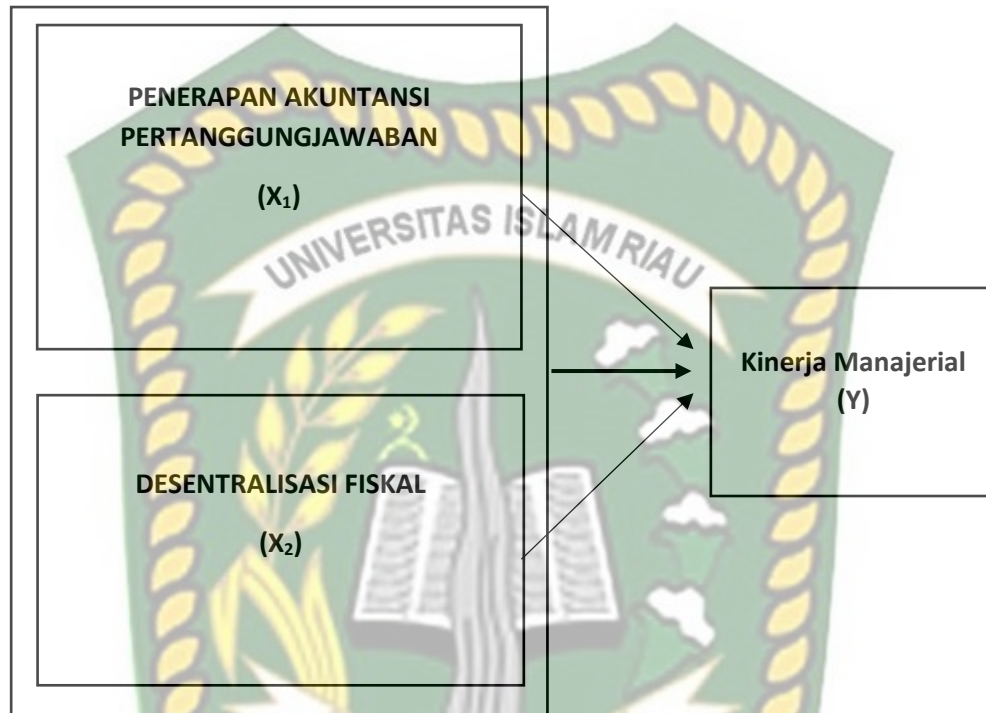
No	Penelitian	Tahun	Judul Pengarang	Hasil penelitian
1	Erma Sarah Yuliasuti	2016	Pengaruh partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja manajerial (Studi pada dinas pendapatan dan pengelolaan aset daerah provinsi jawa tengah)	Partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial dan akuntansi pertanggungjawaban secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja manajerial.
2	Wiwik Pratiwi, Andari Asri Kartika	2019	Pengaruh Akuntansi Pertanggungjawaban, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial	Akuntansi pertanggungjawaban, komitmen organisasi, dan partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan secara parsial maupun simultan terhadap kinerja manajerial.
3	Yuditha Andini Simanjuntak	2018	Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Akuntansi Pertanggung Jawaban Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Pelabuhan	Dalam penelitian ini partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban memiliki pengaruh secara parsial secara positif

			Indonesia I (Persero) Cabang Belawan	
4	Daniel T.H. Manurung	2012	Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Akuntabilitas dan Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palangkaraya	Dalam penelitian ini Terdapat pengaruh positif antara variabel desentralisasi fiskal, akuntabilitas dan sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD)
5	Yuni Harteti, Darwanis, Syukriy Abdullah	2014	Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh	Dalam penelitian ini terdapat pengaruh antara variabel desentralisasi fiskal dengn kinerja keuangan dan juga terdapat pengaruh antara belanja daerah dengan kinerja keuangan

Sumber : Jurnal dan Skripsi

2.3. Kerangka Pemikiran

Berikut adalah kerangka konseptual dari penelitian ini :



2.4. Hipotesis

Berdasarkan teori yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa hipotesis penelitian sebagai berikut :

- H1 : Penerapan akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah pada OPD.
- H2 : Desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah OPD.
- H3 : Penerapan akuntansi pertanggungjawaban dan desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah OPD.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Objek dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini adalah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di Kabupaten Siak, Kota Siak Sri Indrapura.

3.2. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini penulis mengambil populasi pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada pada Kabupaten Siak Sri Indrapura yang berjumlah 54 OPD. Sampel dalam penelitian ini adalah 27 OPD yang terdiri dari dinas dan badan. Alasan peneliti hanya mengambil 27 OPD sebagai sampel yaitu untuk mempersempit ruang lingkup penelitian dikarenakan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu. Dari setiap sampel di ambil sebanyak 3 responden dengan pertimbangan waktu dan jarak penelitian. Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah kepala sub bagian program, kepala sub bagian umum, kepala sub bagian keuangan dengan mempertimbangkan keterkaitan jabatan dengan judul yang diteliti. Adapun kriteri didasarkan bahwa tiap-tiap pihak tersebut mempunyai wewenang dan tanggungjawab dalam membantu sekretarias dalam urusan keuangan, kearsipan, administrasi kepegawaian dilingkup masing-masing

dinas, serta membuat laporan berkala yang akan dilaporkan kepada pimpinan dan Jumlah responden sebanyak 81 orang juga dianggap mampu untuk menggambarkan kinerja pemerintah daerah dari tiap instansi keseluruhan.

Daftar sampel dan reponden dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.1
Distribusi sampel pada tiap OPD Kabupaten Siak

No	Nama satuan kerja	Jumlah responden
1	Inspektorat	3
2	Dinas Kesehatan	3
3	Dinas Pendidikan	3
4	Dinas pekerjaan umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.	3
5	Rumah Sakit Umum Daerah	3
6	Dinas Sosial	3
7	Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan	3
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3
9	Dinas Ketahanan Pangan	3
10	Dinas Lingkungan Hidup	3
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	3
13	Dinas Perhubungan	3
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	3
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	3
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3

17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3
18	Dinas Perpustakaan	3
19	Dinas Perikanan dan Peternakan	3
20	Dinas Pariwisata	3
21	Dinas Pertanian	3
22	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3
23	Satuan Polisi dan Pamong Praja	3
24	Badan Keuangan Daerah	3
25	Badan kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	3
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3
27	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3
Jumlah		81

Sumber : <https://siakkab.go.id/lakip-kab-siak/>

3.3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber asli (tanpa perantara) langsung pada jawaban responden melalui kuisisioner. Data primer dalam penelitian ini adalah mengenai tanggapan responden terhadap variabel penerapan akuntansi pertanggungjawaban, desentralisasi fiskal dan kinerja pemerintah daerah. Kuisisioner dibagikan kepada kepala sub bagian program, umum dan keuangan yang dianggap tahu dan mengerti mengenai variabel dalam penelitian ini.

3.4. Operasional Variabel

1. Variabel Independen (X)

Variabel independent adalah variabel yang menjelaskan atau yang mempengaruhi variabel lain. Variabel independent dalam penelitian ini adalah :

1. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban (X_1)

Penerapan akuntansi pertanggungjawaban menurut Yuliasuti (2016) didefinisikan sebagai sistem yang terbentuk dari struktur organisasi yang terbagi dengan beberapa pos pertanggungjawaban, yang berguna sebagai pengukur kinerja, pemisah fungsi, tugas dan tanggungjawab yang jelas.

Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner dari penelitian Yuliasuti (2016), dengan model skala likert lima poin yang dimulai dari skala 1 sangat tidak setuju, sampai skala 5 sangat setuju. Indikator untuk variabel akuntansi pertanggungjawaban adalah struktur organisasi, anggaran atau perencanaan, sistem biaya dan pelaporan biaya.

2. Desentralisasi fiskal (X_2)

Desentralisasi fiskal menurut Manurung (2012) diartikan sebagai penyerahan wewenang kepada daerah untuk menggali sendiri sumber-sumber penerimaan daerah sesuai dengan potensinya masing-masing.

Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner dari penelitian Manurung (2012) dengan model skala likert lima poin, yang

dimulai dari skala 1 sangat tidak setuju, sampai skala 5 menunjukkan sangat setuju. Indikator untuk variabel desentralisasi fiskal antara lain adalah tingkat kemandirian daerah, tingkat, tingkat belanja daerah, laju pertumbuhan ekonomi.

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen merupakan variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independent. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja pemerintah pada OPD.

Kinerja menurut Bastian dalam penelitian Manurung (2012) diartikan sebagai gambaran pemerintah mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan suatu organisasi dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan suatu organisasi.

Pengukuran variabel ini menggunakan instrument kuesioner dari penelitian yang dilakukan oleh Manurung (2012) dengan model skala likert lima poin, yang dimulai dari skala 1 sangat tidak setuju, sampai skala 5 sangat setuju. Indikator untuk variabel kinerja pemerintah OPD antara lain kemandirian yang tinggi, kinerja penyelenggara, rendahnya ketergantungan kepada pemerintah, kualitas dan kuantitas.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah dengan kuisisioner. kuisisioner merupakan salah satu cara pengumpulan data yang berupa respon tertulis guna memberikan pendapat atau penilaian terhadap suatu pernyataan. Kuisisioner digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumber atau

informan. kegiatan pembagian kuisisioner ini di lakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Siak Sri Indrapura kepada bagian Sekretariat yang dibawah langsung oleh kepala Dinas, adapun pembagian kuisisioner ini diberikan kepada kepala sub bagian program, kepala sub bagian keuangan, dan kepala sub bagian umum yang memiliki pengaruh terhadap variabel penelitian. kuisisioner di bagikan secara langsung dengan mendatangi responden dan dapat memberikan penjelasan apabila ada pos pertanyaan atau item pertanyaan yang tidak dimengerti,serta dapat diperoleh kembali secara langsung hasil dari jawaban kuisisionernya dari para responden.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan model regresi linier dengan mengolah data dengan menggunakan program SPSS (*statistical package for social science*) 24. berikut adalah pengujian yang dilakukan dari hasil penelitian ini.

3.6.1. Uji Instrumen

3.6.1.1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisisioner. Validitas item-item pernyataan kuisisioner dapat diukur dengan melakukan korelasi antara skor item pernyataan dengan total skor variabel atau konstruk. apabila korelasi antara masing-masing item atau indikator terhadap total skor variabel menunjukkan hasil probabilitas $<0,05$, maka dapat dikatakan valid (Ghozali,2016).

3.6.1.2. Uji Reliabilitas

Uji ini digunakan untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisisioner dikatakan *reliable* atau handal respon dari seorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Tingkat *reliable* atau variabel atau konstruk penelitian dapat dilihat dari hasil uji statistic Cronbach alpha (α). Variabel atau konstruk dikatakan *reliable* jika nilai Cronbach alpha $>0,60$. Semakin nilai alphanya mendekati satu, maka nilai reliabilitasnya semakin terpercaya.

3.6.2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk memprediksi, bagaimana perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dinaikkan atau diturunkan nilainya (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini, persamaan regresi dinyatakan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

- Y = Kinerja Pemerintah
- α = Konstanta atau Koefisien
- b_1 = Koefisien regresi penerapan akuntansi pertanggungjawaban
- b_2 = Koefisien regresi Desentralisasi Fiskal
- X_1 = Penerapan akuntansi pertanggungjawaban
- X_2 = Desentralisasi Fiskal
- e = tingkat eror

3.6.3. Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik digunakan untuk melihat apakah didalam model regresi tersebut terdapat suatu penyimpangan, sehingga perlu diadakan pemeriksaan dengan menggunakan pengujian normalitas, multikorelasionalitas, dan heterokedatisitas.

3.6.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji T dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2016). Pengujian normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Apabila data hasil perhitungan *one-sample Kolmogorov-Smirnov* menghasilkan nilai diatas 0,05, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sebaliknya, apabila data hasil perhitungan *one-sample Kolmogorov-Smirnov* menghasilkan nilai dibawah 0,05, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2016)

3.6.3.2. Uji Multikorelasionalitas

Uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi diantara variabel independent. Uji multikorelasionalitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melihat VIF (variance inflation factor) dan nilai tolerance. Jika VIF >10 dan nilai tolerance < 0,10 maka terjadi gejala multikorelasionalitas, dan

apabila $VIF < 10$ dan nilai tolerance $> 0,10$ maka terbebas gejala multikorelasionalitas (Ghozali,2016).

3.6.3.3. Uji Heterokedatisitas

Uji heterokedatisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homokedatisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terkena gejala heterokedatisitas. Heterokedatisitas dapat diketahui dengan cara melihat pola grafik *scatterplot*. Jika titik menyebar keatas dan kebawah angka nol pada sumbu Y, maka hal tersebut tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Selain itu untuk memastikannya dapat dilakukan dengan uji glejser. Jika probabilitas signifikansi masing-masing variabel independen $>0,05$, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi (Ghozali, 2016).

3.6.4. Uji Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Dengan model regresi linier berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya.model ini digunakan untuk menguji dua pengaruh atau lebih dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval rasio dalam suatu persamaan linier.

Uji hipotesis ini akan dilakukan dengan :

3.6.4.1. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independent secara bersama-sama dapat berpengaruh terhadap variabel dependen dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut (Ghozali,2016) :

1. Menentukan formulasi hipotesis :

$H_0 : b_1 = 0$ artinya, semua variabel (X) secara simultan tidak mempengaruhi variabel terikat (Y)

$H_a : b_1 > 0$ artinya, semua variabel (X) secara simultan mempengaruhi variabel terikat (Y)

2. Menentukan kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$)

3. Menentukan signifikasi :

Nilai signifikasi (P value) $< 0,05$, maka H_a diterima.

Nilai signifikasi (P value) $> 0,05$, maka H_a ditolak.

3.6.4.2. Uji T

Uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independent secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependent. Jika ini probability T lebih kecil dari 0,05 maka variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali,2016). dasar pengambilan keputusan untuk uji ini adalah sebagai berikut :

1. Apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H_a ditolak, ini berarti bahwa variabel independent tidak berpengaruh secara individual terhadap variabel independent.

2. Apabila nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka H_a diterima, ini berarti bahwa variabel independent mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen.

3.6.5. Uji Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2016), uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independent dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Klasifikasi koefisien korelasi tanpa memperhatikan arah adalah sebagai berikut:

- 1) 0 : Tidak ada korelasi
- 2) 0 sampai 0,49 : Korelasi lemah
- 3) 0,50 : Korelasi moderat
- 4) 0,51 sampai 0,99 : Korelasi kuat
- 5) 1,00 : Korelasi sempurna

BAB IV

GAMBARAN UMUM OPD KABUPATEN SIAK

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum OPD di Kabupaten Siak

Pemerintah kabupaten siak dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh beberapa OPD. Setiap OPD sebagai pengguna anggaran barang menjalankan tugasnya dengan melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugas OPD yang bersangkutan. Setiap OPD membantu pemerintah Kabupaten Siak dalam pengelolaan Keuangan daerah.

4.1.2. Gambaran Umum Kabupaten Siak

Kabupaten Siak merupakan daerah bekas Kerajaan Siak yang didirikan pada tahun 1.723 masehi oleh Raja Kecil yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahman Syah, diawal kemerdekaan Sultan Syarif Kasim II merupakan Sultan Siak terakhir menyatakan kerajaannya bergabung dengan Negara Republik Indonesia. Kemudian pada tahun 1999 berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 Kabupaten Siak menjadi kabupaten baru yang terpisah dari Kabupaten Bengkalis dengan ibu kota Siak Sri Indrapura.

4.1.2.1. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Siak terletak antara 1°16'30" Lintang Utara sampai dengan 0°20'49" Lintang Utara dan 100°54'21" Bujur Timur sampai dengan 102°10'59" Bujur Timur, sebagian besar Kabupaten Siak terdiri dari dataran rendah dibagian timur dan sebagian dataran tinggi disebelah barat, dengan kemiringan lereng sekitar 0°-3° atau bisa dikatakan

hampir datar, sedangkan satuan perbukitan mempunyai ketinggian antara 50-150m dari daerah sekitar dengan kemiringan 3°-15°. Namun, karena sebagian besar wilayahnya relatif datar (14-30m dpl), potensi untuk terjadi banjir cukup besar di beberapa tempat terutama di daerah sepanjang Sungai Siak.

Secara fisik geografis Kabupaten Siak memiliki kawasan pesisir pantai yang hampiran dengan sejumlah negara tetangga dan masuk kedalam daerah segitiga pertumbuhan (*Growth triangle*) Indonesia-Malaysia-Singapura.

4.1.2.2. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah kabupaten siak adalah 8.556,09 Km² atau 9,74% dari total luas wilayah Provinsi Riau, merupakan wilayah terluas ke-6 dari seluruh kabupaten/kota di provinsi Riau yang terdiri dari 14 Kecamatan. Secara administrasi batas-batas wilayah kabupaten siak sebagai berikut :

1. Sebelah utara perbatasan dengan kabupaten bengkalis dan kabupaten kepulauan meranti.
2. Sebelah selatan perbatasan dengan kabupaten Kampar, kabupaten pelalawan, dan kota pekanbaru.
3. Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten pelalawan dan kabupaten kepulauan meranti.
4. Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten bengkalis, kabupaten rokan hulu, kabupaten kampar dan kota pekanbaru.

4.1.2.3. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Siak pada tahun 2018 mencapai 422.869 jiwa, menurut jenis kelamin jumlah laki-laki mendominasi dari perempuan

yaitu sebesar 218.781 jiwa (51,74%) dan perempuan sebesar 204.088 jiwa (48,26%). Dibandingkan jumlah penduduk pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 5.583 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Siak sebesar 49,42 jiwa/Km².

4.1.3. Visi dan Misi Kabupaten Siak

Visi kabupaten siak :

Terwujudnya kabupaten siak yang maju dan sejahtera dalm lingkungan masyarakat yang agamis dan berbudaya melayu serta menjadikan kabupaten siak sebagai tujuan pariwisata disumatera.

Misi kabupaten siak :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berkhlik, beriman dan bertaqwa.
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, terutama kampung-kampung serta penerapan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
3. Mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan berdaya saing melalui pembangunan dan pengembangan sektor pertanian, perkebunan perikanan, dan perternakan serta sektor-sektor produktif lainnya.
4. Mewujudkan destinasi wisata yang berdaya saing
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang prima.

4.1.4. Struktur Organisasi dan Tatakerja Daerah Kabupaten Siak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, pemerintah kabupaten siak telah membentuk kelembagaan perangkat daerah dengan peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Siak. Susunan organisasi badan dan dinas daerah kabupaten siak adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Susunan Organisasi Kabupaten Siak

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	Inspektorat
2	Dinas kesehatan
3	Dinas Pendidikan
4	Dinas pekerjaan umum, tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman
5	Rumah sakit umum daerah
6	Dinas social
7	Dinas transmigrasi dan tenaga kerja
8	Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
9	Dinas ketahanan pangan
10	Dinas lingkungan hidup
11	Dinas kependudukan dan catatan sipil
12	Dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung
13	Dinas perhubungan
14	Dinas komunikasi dan informatika
15	Dinas koperasi, usaha mikro kecil dan menengah
16	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

17	Dinas kepemudaan dan olahraga
18	Dinas perpustakaan
19	Dinas perikanan dan perternakan
20	Dinas pariwisata
21	Dinas pertanian
22	Dinas perdagangan dan perindustrian
23	Satuan polisi pamong praja
24	Badan keuangan daerah
25	Badan kepegawaian dan pengembangan sdm daerah
26	Badan penanggulangan bencana
27	Badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah
28	Bagian administrasi pemerintah
29	Bagian administrasi kesejahteraan rakyat
30	Bagian pertanahan
31	Bagian administrasi perekonomian
32	Bagian administrasi pembangunan
33	Bagian pengadaan barang dan jasa
34	Bagian organisasi
35	Bagian hokum
36	Bagian umum
37	Bagian humas dan protokoler
38	Kantor kesatuan bangsa dan politik
39	Sekretariat DPRD
40	Sekretariat KORPRI
41	Kecamatan Siak
42	Kecamatan Sungai apit
43	Kecamatan Minas
44	Kecamatan Tualang
45	Kecamatan Dayun

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

46	Kecamatan Kerinci kanan
47	Kecamatan Bunga raya
48	Kecamatan Sungai Mandau
49	Kecamatan Kandis
50	Kecamatan koto gasib
51	Kecamatan Lubuk dalam
52	Kecamatan Sabak auh
53	Kecamatan Mempura
54	Kecamatan Pusako

Sumber : <https://siakkab.go.id/lakip-kab-siak/BAB V>

4.2. PEMBAHASAN PENELITIAN

4.2.1. DATA PENELITIAN

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan akuntansi pertanggungjawaban dan desentralisasi fiskal terhadap kinerja pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah kabupaten siak.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner sebanyak 81 pada 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Siak. Total kuesioner yang dibagikan adalah 81 kuesioner (100%). Jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 78 (96,30%) dan kuesioner yang tidak terjawab sebanyak atau tidak mendapat respon sebanyak 3 (3,70%), serta jumlah kuesioner yang dapat diolah sebanyak 78 (96,30%). Rincian pengembalian kuesioner oleh para responden adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Tingkat Pengembalian Kuesioner

KETERANGAN	TOTAL	PRESENTASE
Kuesioner yang dikirim	81	100%
Kuesioner yang tidak dapat respon	3	3,70 %
Kuesioner yang kembali	78	96,30%
Kuesioner yang dapat diolah	78	96,30%

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020

Kuesioner yang tidak mendapat respon dalam penelitian ini dimaklumkan karena faktor wabah virus corona yang menghambat aktivitas kerja responden kantor dan faktor kesibukan lainnya, sehingga responden tidak memiliki waktu untuk mengisi kuesioner yang telah diberikan.

4.2.2 DESKRIPSI RESPONDEN

Responden dalam penelitian ini adalah kepala sub bagian keuangan, kepala sub bagian program dan kepala sub bagian umum pada dinas, badan dan kantor instansi pemerintah Daerah Kabupaten Siak. Berdasarkan data yang diperoleh dari 78 kuesioner yang dapat diolah, diperoleh informasi mengenai identitas responden yaitu jenis kelamin, umur, jabatan, masa jabatan dan pendidikan terakhir. Adapun gambaran demografi responden secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.2.

Tabel 4.3
Demografi Responden

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Umur:		
a. usia 20-30 tahun	12	15,38
b. usia 31-40 tahun	25	32,05
c. usia 41-50 tahun	35	44,87
d. usia 51-60 tahun	6	7,69
Jumlah	78	100%
Jenis kelamin :		
a. laki-laki	32	41,03
b. perempuan	46	58,97
Jumlah	78	100%
Jenjang pendidikan:		
a. SMA	3	3,85
b. D3	7	8,97
c. S1	52	66,66
d. S2	16	20,51
e. lainnya	-	0
Jumlah	78	100%
Masa jabatan:		
a. < 5 tahun	11	14,10
b. 5-10 tahun	27	34,62
c. > 10 tahun	40	51,28
Jumlah	78	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020

Dari tabel diatas dapat kita lihat untuk umur responden dari 78 responden terdiri dari 12 (15,38%) merupakan responden dengan rentang usia 20-30 tahun, 25 (32,05%) orang responden dengan usia 31-40 tahun, 35 (44,87%) orang responden dengan usia 41-50 tahun, dan 6 atau (7,69%) orang responden dengan usia 51-60 tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas kepala sub bagian pada instansi pemerintahan Kabupaten Siak berusia 41-50 tahun.

Dari 78 responden tersebut kita juga dapat mengetahui bahwa 32 atau (41,03%) orang responden yang berjenis kelamin laki-laki dan 46 atau

(58,97%) merupakan responden berjenis kelamin perempuan. Hingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar posisi pejabat di kabupaten siak dipegang oleh perempuan.

Jenjang pendidikan dari 78 responden terdiri dari 3 (3,85%) dengan responden yang pendidikan terakhir SMA/SMK. 7 (8,97%) responden dengan pendidikan terakhir D3. 52 (66,66%) responden dengan pendidikan terakhir S-1 dan 16 (20,57%) responden dengan pendidikan terakhir S-2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berpendidikan S-1.

Masa jabatan dari 78 responden penelitian ini terdiri dari 11 (14,10%) orang responden yang masa jabatannya kurang dari 5 tahun. Sedangkan 27 (34,62%) responden dengan masa jabatannya 5-10 tahun, dan 40 atau (51,28%) orang responden dengan masa jabatannya lebih dari 10 tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden masa jabatannya lebih dari 10 tahun.

4.2.3. TEKNIK ANALISIS DATA

4.2.3.1. Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu kinerja pemerintah dan menggunakan dua variabel independennya yaitu penerapan akuntansi pertanggungjawaban dan desentralisasi fiskal. Penilaian skala dalam penelitian ini menggunakan skala likert sebagai metode pengukuran. Adapun ketentuannya sebagai berikut :

Sangat Tidak Setuju = 1

Tidak Setuju	= 2
Ragu-ragu	= 3
Setuju	= 4
Sangat Setuju	= 5

Tabel 4.4
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
x1	78	61	119	94,32	11,956
x2	78	5	15	10,33	2,383
Y	78	30	55	43,54	5,806
Valid N (listwise)	78				

Sumber : Output SPSS 24, 2020

Berdasarkan tabel 5.3 tersebut Penerapan Akuntansi Pertanggung jawaban (X1) memiliki 78 responden dengan nilai maksimum responden 119 dan nilai minimum responden 61 serta nilai rata-rata jawaban responden 94,32 dengan standar deviasi 11,956.

Desentralisasi fiskal (X2) memiliki 78 responden dengan nilai maksimum responden 15 dan nilai minimum responden 5 serta nilai rata-rata jawaban responden 10,33 dengan standar deviasi 2,383.

Kinerja pemerintah (Y) memiliki 78 responden dengan nilai maksimum responden 55 dan nilai minimum responden 30 serta nilai rata-rata jawaban responden 43,54 dengan standar deviasi 5,806.

4.2.3.2. Uji Kualitas Data

4.2.3.2.1. Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk menguji apakah valid atau tidaknya suatu kuesioner penelitian. Hasil pengujian validitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas

ITEM	NILAI KORELASI	PROBABILITAS KORELASI	KESIMPULAN
X1.1	0,607	0,000	VALID
X1.2	0,508	0,000	VALID
X1.3	0,522	0,000	VALID
X1.4	0,596	0,000	VALID
X1.5	0,550	0,000	VALID
X1.6	0,631	0,000	VALID
X1.7	0,556	0,000	VALID
X1.8	0,615	0,000	VALID
X1.9	0,678	0,000	VALID
X1.10	0,463	0,000	VALID
X1.11	0,339	0,002	VALID
X1.12	0,531	0,000	VALID
X1.13	0,665	0,000	VALID
X1.14	0,560	0,000	VALID
X1.15	0,741	0,000	VALID
X1.16	0,567	0,000	VALID
X1.17	0,677	0,000	VALID
X1.18	0,573	0,000	VALID
X1.19	0,574	0,000	VALID
X1.20	0,656	0,000	VALID
X1.21	0,654	0,000	VALID
X1.22	0,500	0,000	VALID
X1.23	0,592	0,000	VALID
X1.24	0,424	0,000	VALID
X2.1	0,770	0,000	VALID
X2.2	0,873	0,000	VALID
X2.3	0,763	0,000	VALID
Y1.1	0,794	0,000	VALID
Y1.2	0,739	0,000	VALID
Y1.3	0,682	0,000	VALID

Y1.4	0,652	0,000	VALID
Y1.5	0,781	0,000	VALID
Y1.6	0,662	0,000	VALID
Y1.7	0,548	0,000	VALID
Y1.8	0,603	0,000	VALID
Y1.9	0,447	0,000	VALID
Y1.10	0,504	0,000	VALID
Y1.11	0,565	0,000	VALID

Sumber : Output SPSS 24, 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa semua variabel memenuhi kriteria valid, adapun kriteria kuesioner yang valid yaitu setiap item pernyataan/pertanyaan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

4.2.3.2.2. Uji Reliabilitas

uji reabilitas digunakan untuk mengetahui dan mengukur konsistensi suatu penelitian dengan melihat nilai *Cronbach's Alpha Coefficient*. Hasil uji reabilitas data dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.6
Hasil Uji Reabilitas

Variabel	<i>Cronbach's alpha</i>	keterangan
Penerapan akuntansi pertanggungjawaban	0,909	<i>Reliable</i>
Desentralisasi fiskal	0,722	<i>Reliable</i>
Kinerja pemerintah	0,848	<i>Reliable</i>

Sumber : Output SPSS 24, 2020

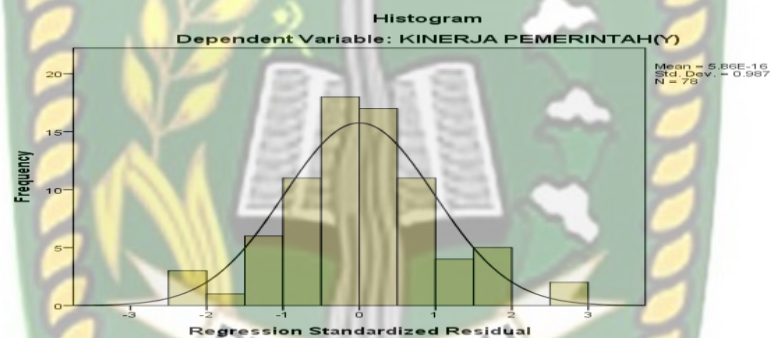
Tabel 5.5 menunjukkan nilai *Cronbach's alpha* pada masing-masing variabel dengan pernyataan yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini reliable karena secara keseluruhan bernilai lebih dari 0,60.

4.2.3.3. Uji Asumsi Klasik

4.2.3.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji asumsi residual yang berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah dimana model yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian uji normalitas yang digunakan adalah grafik histogram, kurva penyebaran P-plot dan one sample Kolmogrov-Smirnav test.

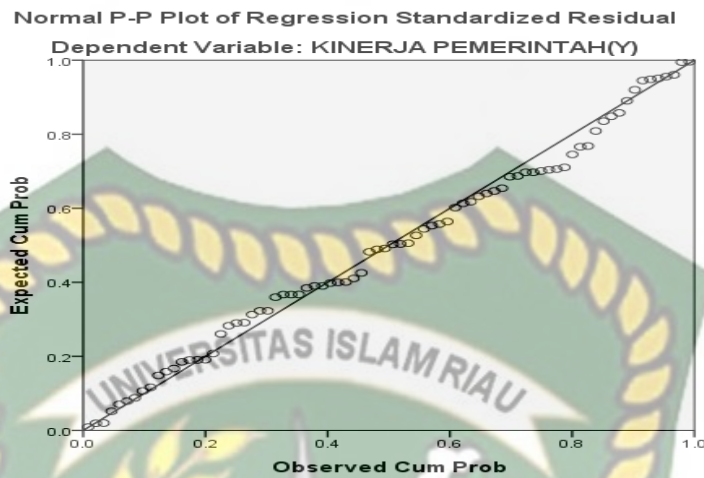
Gambar 4.1 Grafik Histogram



Sumber : Output SPSS 24, 2020

Berdasarkan grafik histogram diatas, dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang mendekati normal, hal ini dibuktikan dengan melihat bahwa grafik membentuk simetris dan mengikuti arah diagonal.

Gambar 4.2 Normal Probability Plot



Sumber : Output SPSS 24, 2020

Berdasarkan grafik normal plot, kita dapat melihat bahwa tidak menyebarkan di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwa pola distribusinya normal.

Tabel 4.7
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		78
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,02045188
Most Extreme Differences	Absolute	,082
	Positive	,082
	Negative	-,050
Test Statistic		,082
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber : Output SPSS 24, 2020

Dari tabel 5.6 dapat kita ketahui bahwa hasil uji normalitas menyatakan kolmogrov-Smirnov test dengan nilai signifikan 0,200. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal. Dengan melihat grafik dan tabel diatas dapat disimpulkan

bahwa model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.

4.2.3.3.2. Uji Multikorelasionalitas

uji multikorelasionalitas merupakan uji yang diajukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variabel independen). Adapun hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 5.7 berikut ini :

Tabel 4.8
Hasil Uji Multikorelasionalitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN(X1)	,871	1,148
DESENTRALISASI FISKAL(X2)	,871	1,148

Sumber : Output SPSS 24, 2020

Berdasarkan hasil uji diatas dapat dilihat bahwa hasil uji multikolinieritas varibel penerapan akuntansi pertanggungjawaban memiliki nilai VIF 1,148 dan nilai tolerance sebesar 0,871 dan desentralisasi fiskal memiliki nilai VIF 1,148 dan nilai tolerance sebesar 0,871. Dari kedua variabel tersebut semua nilai toleransi berada diatas 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas.

4.2.3.3.3. Uji Heterokedatisitas

Dalam uji regresi dapat dikatakan baik jika tidak terjadi gejala heterokedatisitas. Heterokedatisitas terjadi jika scatter plot titik-titiknya mempunyai pola yang tidak teratur baik menyempit, melebar maupun bergelombang.



Sumber : Output SPSS 24, 2020

Berdasarkan hasil scatter plot diatas diperoleh bahwa titik penyebaran dibawah dan diatas sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur. Hal ini berarti variabel penerapan akuntansi pertanggungjawaban (X1) dan desentralisasi fiskal (X2) tidak terjadi heteroskedastisitas.

Untuk lebih memastikan tidak terjadinya heterokedastisitas peneliti juga menggunakan uji Glejser. adapun hasil uji glejser sebagai berikut :

Tabel 4.9
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,824	1,772		2,159	,034
PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN(X1)	,003	,020	,018	,153	,879
DESENTRALISASI FISKAL(X2)	-,174	,098	-,215	1,775	,080

Sumber : Output SPSS 24, 2020

Dari hasil tabel 5.8, dapat diketahui bahwa dengan menggunakan uji glejser, probabilitas signifikansi masing-masing variabel independen lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terbebas dari heterokedastisitas.

4.2.3.4. Analisis Regresi Linier Berganda

analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntansi pertanggungjawaban dan desentralisasi fiskal terhadap kinerja pemerintah.

Hasil regresi linier berganda menggunakan SPSS 24 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.10
Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	3,654	2,829
PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN(X1)	,364	,031
DESENTRALISASI FISKAL(X2)	,534	,157

Sumber : Output SPSS 24, 2020

Berdasarkan tabel diatas, persamaan regresi yang dihasilkan adalah :

$$Y = 3,654 + 0,364X_1 + 0,534X_2$$

Hasil dan pembahasan regresi diatas adalah :

- a) Nilai konstanta α (nilai mutlak Y) = 3,654, artinya jika penerapan akuntansi pertanggungjawaban dan desentralisasi fiskal konstan atau 0 (nol) maka kinerja pemerintah bernilai 3,654 atau kinerja pemerintah semakin meningkat.
- b) Nilai koefisien regresi variabel penerapan akuntansi pertanggungjawaban (X_1) sebesar 0,364 artinya jika penerapan akuntansi pertanggungjawaban mengalami kenaikan 1, maka kinerja pemerintah (y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,364 dengan asumsi variabel lain konstan.
- c) Nilai koefisien regresi variabel desentralisasi fiskal (x_2) sebesar 0,534 artinya jika desentralisasi fiskal mengalami kenaikan 1, maka kinerja pemerintah (y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,534 dengan asumsi variabel lain konstan.

4.2.3.5. Pengujian Hipotesis

4.2.3.5.1. Uji Partial (Uji T)

Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel-variabel independen yang ada dalam model regresi secara individu terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05. Jika nilai *probability t* kurang dari 0,05 maka H_a diterima dan H_o ditolak, dan apabila jika nilai *probability t* lebih dari 0,05 maka H_a ditolak dan H_o diterima.

Tabel 4.11
Hasil Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,654	2,829		1,291	,201
	PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN(X1)	,364	,031	,750	11,655	,000
	DESENTRALISASI FISKAL(X2)	,534	,157	,219	3,407	,001

Sumber : Output SPSS 24, 2020

a. Hipotesis Pertama (H1)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 5.10 maka diperoleh hasil uji T yang diperlukan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel independen. Dimana signifikansinya $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban (X1) berpengaruh terhadap kinerja pemerintah.

b. Hipotesis Kedua (H2)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 5.10 maka diperoleh hasil uji T yang diperlukan untuk menguji signifikansi konstanta variabel independen. Dimana signifikansinya $0,001 < 0,05$. Hal ini menyatakan bahwa desentralisasi fiska (X2) berpengaruh terhadap kinerja pemerintah.

4.2.3.5.2. Uji Simultan (Uji F)

uji ini digunakan untuk menguji pengaruh dari seluruh variabel independen yang ada dalam model regresi secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_a diterima.

Tabel 4.12
Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1892,904	2	946,452	101,047	.000 ^b
Residual	702,481	75	9,366		
Total	2595,385	77			

Sumber : Output SPSS 24, 2020

c. **Hipotesis ketiga (H3)**

Berdasarkan dari hasil uji F pada tabel 5.11 dapat dilihat nilai signifikan yang diperoleh sebesar $0,000 < 0,005$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan akuntansi pertanggung jawaban (X1) dan desentralisasi fiskal (X2) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap kinerja pemerintah.

4.2.3.6. Koefisien Determinasi

uji ini berguna untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen.

Tabel 4.13
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.854 ^a	,729	,722	3,06046

Sumber : Output SPSS 24, 2020

Dari hasil pembahasan diatas, koefisien determinasi dilihat dari nilai R Square sebesar 0,722 atau 72,2% , hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen mampu menerangkan kinerja manajerial sebesar 72,2%

sedangkan sisanya yaitu 27,8 % dijelaskan oleh faktor-faktor selain variabel yang diteliti.

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1. Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Kinerja Pemerintah.

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama H_1 didapatkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Semakin baik akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan pada SKPD kabupaten siak maka akan semakin baik pula kinerja pemerintah pada SKPD kabupaten Siak.

Penerapan yang baik suatu sistem akuntansi pertanggungjawaban akan mampu menciptakan kinerja yang baik pula dalam organisasi yang dilakukan pada pusat pertanggungjawaban. Indikator dalam penilaian akuntansi pertanggungjawaban sangat mendukung pernyataan yang ada dalam kinerja pemerintah. Komunikasi antar atasan dan bawahan sehingga pusat pertanggungjawaban terlaksana dengan baik secara positif sehingga segala informasi mengenai laporan pertanggungjawaban yang dibuat mampu menjelaskan secara logis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penerapan akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja pemerintah pada organisasi perangkat daerah (OPD) kabupaten siak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh yuliasuti (2016)

dan Simanjuntak (2018) yang berhasil membuktikan penerapan akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah.

4.3.2. Pengaruh desentralisasi fiskal dengan kinerja pemerintah

Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua H2 didapatkan desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah pada kabupaten siak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal akan dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dan meningkatkan akuntabilitas. Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal pemerintah daerah harus mampu menggali potensi-potensi yang ada didaerahnya sendiri agar dapat memberikan kontribusi baik secara keuangan dalam peninkatan PAD maupun non keuangan seperti pelayanan kepada publik. Bukan hanya sekedar efektivitas dan efisiensi tapi juga dilihat dari penggunaan jasa layanan pemerintah.

4.3.3. Pengaruh penerapan akuntansi pertanggungjawaban dan desentralisasi fiskal terhadap kinerja pemerintah.

Penerapan kutansi pertanggungjawaban dan desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah. Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel 5.11 pada uji F dan diperoleh nilai F hitung sebesar 101,047 dengan tingkat signifikannya 0,000 oleh karena probabilitasnya lebih kecil dari 0,005 maka hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban dan

desentralisasi fiskal secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Manurung (2012).

Akuntansi pertanggungjawaban dan desentralisasi fiskal merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah. Terbukti dengan akuntansi pertanggung jawaban dan desentralisasi fiskal berpengaruh secara bersama sama terhadap kinerja pemerintah. Untuk meningkatkan kinerja pemerintah maka dibutuhkan komunikasi dan kejelasan wewenang yang di bentuk melalui struktur organisasi sehingga terciptanya tujuan yang sama dalam suatu organisasi dan semua pihak mengerti tugas dan fungsinya dalam suatu organisasi tersebut, sehingga target kerja yang diinginkan sesuai dengan yang telah ditentukan .



BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan guna memperoleh bukti empiris mengenai adana pengaruh penerapan akuntansi pertanggungjawaban dan desentralisasi fiskal terhadap kinerja pemerintah. Sampel penelitian adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Siak. Berdasarkan hasil pengolahan data dan penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian secara determinasi pada tabel 5.12 dinyatakan bahwa variabel penerapan akuntansi pertanggungjawaban dan desentralisasi fiskal mampu menerangkan atau menjelaskan variabel kinerja pemerintah. Dengan nilai R Square sebesar 72,2% atau 0,7 dan sisanya 27,8% kemungkinan dijelaskan oleh faktor-faktor variabel lainnya.
2. Hasil pengujian secara parsial pada tabel 5.10 menyatakan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah dan desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Siak.
3. Hasil pengujian secara simultan pada tabel 5.11 menyatakan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban dan desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Siak.

5.2. SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis hendak memberikan beberapa saran untuk pemerintah kabupaten siak dan juga peneliti yang akan datang agar penelitian selanjutnya lebih sempurna. Saran-saran yang penulis berikan antara lain :

1. Bagi pemerintah kabupaten siak agar lebih meningkatkan lagi dalam menggali sumber pendapatan daerah sehingga dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang lebih besar lagi kepada masyarakat Kabupaten Siak.
2. Untuk penelitian selanjutnya agar dapat mempertimbangkan penambahan variabel yang berkaitan dengan kinerja pemerintah. Untuk hasil yang lebih baik, perlu ditambahkan metode lain selain penyebaran kuesioner, seperti wawancara/interview untuk mendukung hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta :UPP STIM YKPN.
- Bintariani, L. 2015. *Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Penilaian Kinerja Pusat Biaya pada PT. Herculon Carpet Semarang*. Skripsi. Universitas Dian Nurwantoro. Semarang.
- Bastian, Indra. 2014. *Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Cobbold, I, Lawrie, G & Issa, K. *Designing a Strategic Management System Using the Third-Generation Balanced Scorecard : A Case Study*. International Journal of Productivity and Performance Management. Emerald Article.
- Garrison, R. H., Noreen, E. W., dan Brewer P.C. 2010. *Managerial Accounting*. 13th ed. The McGraw- Hill Companies. New York.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke 7. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Khusufi. 2016. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Hansen, D. R., dan Mowen M.M. 2011. *Akuntansi Manajerial*. Salemba Empat. Jakarta.
- Hansen, D. R., dan Mowen M.M. 2015. *Akuntansi Manajerial*. Edisi Delapan. Buku 1. Cetakan Kesembilan. Salemba Empat. Jakarta.
- Krismi, dan Aryani Y.A. 2011. *Akuntansi Manajemen*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Lubis, Arfan Ikhsan. 2018. *Akuntansi Keprilakuan*. Edisi 3, Jakarta Selatan, Salemba Empat.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.

- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Manurung, Daniel T. H. 2012. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Akuntabilitas dan Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja pada SKPD Kota Palangkaraya*. Skripsi. Universitas Widyatama. Bandung.
- Mulyadi. 2010. *Akuntansi Manajemn, Konsep, Manfaat dan Rekayasa*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mulyadi. 2015. *Akuntansi Biaya, Edisi 5*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Novita, Dwi. 2018. *Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Penilaian Kinerja Pada Pusat Biaya*. PT Perkebunan Nusantara V Pekanbaru. Skripsi. Universitas Islam Riau. Pekanbaru.
- Rivai, Velthzal dan Ella Jauvani Sagala. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sandi Hidayat, Noor, *Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Jawa Timur*, Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol, 2 No.I, Januari. 2016.
- Simamora, Henry. 2012. *Akuntansi Manajemen*. Jakarta : Star Gate Publisher.
- Simanjuntak, Yuditha Andini. 2018. *Pengaruh partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja manajerial pada PT.Pelabuhan Indonesia I (persero) cabang belawan*. Skripsi S1, Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan. Area Medan.
- Tao, Zhang dan Zhou Heng Fu. 1998. *Fiscal Decentralization. Public Spending and Economic Growth in China*. *Journal of Public Expenditure* 67,221240.
- Yuliasuti, Erma Sarah. 2016. *Pengaruh partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja manjerial (Studi pada dinas pendapatan dan pengelolaan aset daerah Provinsi Jawa Tengah)*. Skripsi S1, Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nurwantoro. Semarang.
- Zikriana, Sheila. 2017. *Pengaruh Desentralisasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Manajerial. SKPD Kabupaten Kampar*. Skripsi. Universitas Islam Riau. Pekanbaru.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Siak. “*Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Siak*”. [Http://siakkab.go.id/lakip-kab-siak/](http://siakkab.go.id/lakip-kab-siak/) Diakses pada tanggal 19 Febuari 2020.

Permendagri Nomor 13 tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 *Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Tanjung, Chaidir Anwar. 2017. “Kasus Korupsi Kepala Dinas PMPD Kabupaten Siak Atas Kasus SIMKODES”. <https://news.detik.com/berita/d-3524919/kepala-dinas-di-siak-riau-jadi-tersangka-kasus-korupsi-simkudes> Diakses pada tanggal 26 Agustus 2020.

